PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KECAMATAN SARMI KABUPATEN SARMI

Renny Wenda
NPP. 33.1158
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: Wendarenny1@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si
Email: evaeviany@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *The implementation of livestock control policies in local governments has been widely discussed in the context of public order enforcement. However, limited studies specifically examine the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in livestock control at the district level, particularly in Sarmi District, Sarmi Regency, where free-roaming livestock continue to affect public order and community comfort despite the existence of local regulations governing livestock management.* ***Purpose:*** *This study aims to describe and analyze the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in controlling livestock in Sarmi District, Sarmi Regency.* ***Method:*** *This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The analysis was conducted inductively using Role Theory by B.J. Biddle, which consists of role expectations, role norms, role behavior, and role evaluation.* ***Result:*** *The findings indicate that the role of Satpol PP in livestock control has been implemented through the fulfillment of role expectations derived from regional regulations and organizational mandates. Role norms were reflected in the application of operational procedures and regulatory provisions governing livestock control. Role behavior was demonstrated through the execution of socialization, patrol, enforcement, and regulatory compliance activities. Furthermore, role evaluation showed that Satpol PP continuously assessed the implementation of livestock control activities in accordance with established duties and responsibilities.* ***Conclusion:*** *The role of Satpol PP in controlling livestock in Sarmi District has been carried out through the implementation of role expectations, role norms, role behavior, and role evaluation as part of its responsibility to maintain public order and enforce regional regulations.*

Keywords: *Civil Service Police Unit; Livestock Control; Public Order; Role; Sarmi District.*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan penelitian mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban hewan ternak pada tingkat kecamatan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada penegakan peraturan daerah, komunikasi organisasi, perlindungan hak asasi manusia, dan pengawasan ketertiban umum secara umum, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis peran Satpol PP dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi masih terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menggunakan teori peran B.J. Biddle yang meliputi harapan peran, norma peran, perilaku peran, dan evaluasi peran. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa harapan peran Satpol PP dalam penertiban hewan ternak telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan daerah dan tugas kelembagaan yang berlaku. Norma peran tercermin dalam pelaksanaan tugas yang mengacu pada prosedur dan ketentuan penertiban hewan ternak. Perilaku peran diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi, patroli, penertiban, dan pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Evaluasi peran dilaksanakan melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas penertiban sebagai bagian dari tanggung jawab Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum. **Kesimpulan:** Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi telah dilaksanakan melalui penerapan harapan peran, norma peran, perilaku peran, dan evaluasi peran sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum.

Kata Kunci: hewan ternak; Kecamatan Sarmi; penertiban; peran; Satuan Polisi Pamong Praja.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketertiban umum merupakan salah satu prasyarat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif. Berbagai negara menempatkan aspek ketertiban publik sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik, keselamatan masyarakat, serta keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam konteks global, keberadaan hewan ternak yang tidak terkendali di ruang publik telah menjadi perhatian berbagai pemerintah daerah karena berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keselamatan lalu lintas, kesehatan lingkungan, dan kenyamanan masyarakat. Pengelolaan ternak yang tidak tertib dapat menyebabkan konflik pemanfaatan ruang publik, pencemaran lingkungan, hingga meningkatnya risiko kecelakaan yang melibatkan manusia maupun hewan. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian hewan ternak menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kedudukan tersebut menjadikan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan berbagai kebijakan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran Satpol PP tidak hanya berkaitan dengan tindakan penertiban, tetapi juga mencakup pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeliharaan ketertiban sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah (Jumadil, 2022; Ramadhany, 2023).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki posisi penting dalam menjaga ketertiban umum melalui pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Penelitian mengenai peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum menunjukkan bahwa keberadaan Satpol PP menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam mewujudkan kondisi sosial yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat (Effendy, 2020; Sukmawati, 2024). Selain itu, berbagai kajian mengenai implementasi kebijakan ketertiban umum juga menegaskan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat (Nugraha, 2023).

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus membahas peran Satpol PP dalam penertiban hewan ternak masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji penegakan Perda terhadap pedagang kaki lima, bangunan liar, pelanggaran ketertiban

umum, maupun perlindungan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian *(research gap)*, khususnya terkait bagaimana peran Satpol PP dijalankan dalam penertiban hewan ternak sebagai salah satu bentuk penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah.

Kabupaten Sarmi merupakan salah satu daerah yang memiliki aktivitas peternakan yang cukup berkembang. Bagi sebagian masyarakat, peternakan menjadi sumber penghidupan sekaligus bagian dari aktivitas ekonomi keluarga. Tingginya jumlah populasi ternak menyebabkan kebutuhan pengawasan dan pengendalian menjadi semakin penting agar keberadaan ternak tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun penggunaan fasilitas publik. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2024, populasi ternak di Kecamatan Sarmi terdiri atas babi, sapi, dan kerbau dengan jumlah yang relatif besar. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023–2024 populasi babi mencapai 449–456 ekor, sapi potong 90–96 ekor, dan kerbau 50–62 ekor. Besarnya populasi ternak tersebut menunjukkan bahwa aktivitas peternakan merupakan salah satu aktivitas yang cukup dominan di wilayah Kecamatan Sarmi.

Dalam rangka menjaga ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten Sarmi telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Peraturan tersebut mengatur kewajiban, larangan, serta ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemilik hewan ternak agar keberadaan ternak tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar. Kehadiran peraturan daerah tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum, Satpol PP Kabupaten Sarmi memiliki peran penting dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak. Data Satpol PP Kecamatan Sarmi menunjukkan bahwa selama tahun 2023–2024 masih terdapat hewan ternak yang diamankan oleh petugas, yang terdiri atas 10 ekor babi, 6 ekor sapi, dan 2 ekor kerbau. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penertiban hewan ternak masih terus dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum di wilayah Kecamatan Sarmi.

Untuk memahami pelaksanaan tugas tersebut, penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh B.J. Biddle. Menurut teori peran, suatu organisasi maupun individu menjalankan tugas berdasarkan harapan peran, norma peran, perilaku peran, dan evaluasi peran. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu tugas tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki, tetapi juga oleh bagaimana peran tersebut dipahami, dijalankan, dan dievaluasi dalam praktik organisasi (Biddle, 1986). Dalam konteks penelitian ini, teori peran digunakan untuk menganalisis bagaimana Satpol PP melaksanakan perannya dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi.

Secara ideal, pelaksanaan penertiban hewan ternak oleh Satpol PP harus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah, prosedur operasional, serta tugas dan fungsi kelembagaan yang telah ditetapkan. Melalui pelaksanaan peran tersebut diharapkan tercipta kondisi lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Namun demikian, masih ditemukannya hewan ternak yang diamankan oleh Satpol PP menunjukkan bahwa aktivitas penertiban tetap menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kecamatan Sarmi. Kondisi tersebut menjadikan penelitian mengenai peran Satpol PP dalam penertiban hewan ternak relevan untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi dengan menggunakan perspektif teori peran B.J. Biddle yang meliputi harapan peran, norma peran, perilaku peran, dan evaluasi peran.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian mengenai peran aparat pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum telah banyak dilakukan baik pada tingkat internasional maupun nasional. Pada tingkat internasional, kajian mengenai *public order enforcement* umumnya menempatkan aparat pemerintah lokal sebagai

instrumen utama dalam implementasi regulasi daerah dan perlindungan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengendalian aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban publik lebih banyak dianalisis melalui perspektif implementasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah (Widodo et al, 2025; Fatimah, 2024; Nurman, 2024). Penelitian lain menegaskan bahwa efektivitas penegakan regulasi daerah sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan fungsi pemerintahan dan kapasitas kelembagaan pemerintah lokal (Kusuma, 2023; Hidayatulloh, 2025). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan dan efektivitas kelembagaan dibandingkan analisis peran organisasi pelaksana berdasarkan perspektif teori peran.

Pada tingkat nasional, penelitian mengenai Satuan Polisi Pamong Praja lebih banyak membahas penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki kedudukan strategis sebagai perangkat daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum (Effendy, 2020; Musa, 2024; Singarimbun, 2025). Sejalan dengan itu, sejumlah karya akademik dosen IPDN juga menjelaskan bahwa Satpol PP merupakan instrumen penting pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat (Supriyatna, 2020; Udaya Madjid, 2021; Labolo, 2022; Wasistiono, 2023; Sadu Wasistiono et al., 2024). Namun, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada implementasi kebijakan, efektivitas penegakan Perda, dan penyelenggaraan ketertiban umum secara umum, sehingga belum banyak yang secara khusus mengkaji peran Satpol PP dalam penertiban hewan ternak menggunakan dimensi teori peran B.J. Biddle yang meliputi harapan peran, norma peran, perilaku peran, dan evaluasi peran.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Pertama, penelitian internasional lebih banyak berorientasi pada implementasi kebijakan dan tata kelola ketertiban publik, sedangkan penelitian nasional lebih berfokus pada penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum oleh Satpol PP. Kedua, penelitian yang secara khusus membahas penertiban hewan ternak sebagai objek utama penelitian masih terbatas. Ketiga, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi menggunakan teori peran B.J. Biddle. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis peran Satpol PP melalui dimensi harapan peran, norma peran, perilaku peran, dan evaluasi peran dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi memiliki urgensi teoritis karena memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pemerintahan daerah, khususnya terkait teori peran dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki kedudukan strategis sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum (Fahmi, 2022; Sukmawati, 2024). Di sisi lain, kajian pemerintahan kontemporer menegaskan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh bagaimana peran organisasi pelaksana dijalankan sesuai dengan tugas dan kewenangannya (Nurman, 2024; Fatimah, 2024). Dalam konteks tersebut, penelitian ini menjadi penting karena memperkaya penerapan teori peran B.J. Biddle pada organisasi pemerintahan daerah, khususnya Satpol PP dalam penertiban hewan ternak yang masih relatif jarang dikaji dalam literatur pemerintahan (Eviany, 2025).

Secara praktis, penelitian ini penting karena memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan peran Satpol PP dalam penertiban hewan ternak sebagai bagian dari penyelenggaraan ketertiban umum di daerah. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab menjaga ketenteraman masyarakat melalui pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum (Suhendi, 2019; Anggraini, 2022). Sejalan dengan itu, berbagai kajian dosen IPDN menegaskan bahwa keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan, pengaturan, dan pengendalian secara efektif (Supriyatna, 2020; Varian & Tefa, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami pelaksanaan peran Satpol PP pada konteks penertiban hewan ternak sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan ketertiban umum di daerah.

Dari aspek kebijakan, penelitian ini memiliki urgensi karena berkaitan langsung dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak serta pelaksanaan tugas Satpol PP sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan peraturan daerah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas implementasi kebijakan daerah sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara kewenangan kelembagaan dan pelaksanaan tugas organisasi pelaksana (Kusuma, 2023; Hidayatulloh, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman akademik mengenai pelaksanaan peran Satpol PP dalam penertiban hewan ternak sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah di Kabupaten Sarmi.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penertiban hewan ternak dan penyelenggaraan ketertiban umum telah banyak dilakukan baik pada tingkat internasional maupun nasional. Kajian mengenai implementasi kebijakan penertiban hewan ternak menunjukkan bahwa pengendalian ternak pada umumnya dianalisis melalui perspektif implementasi kebijakan publik dengan menitikberatkan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan daerah (Widodo et al, 2025). Penelitian lain mengenai pengawasan dan pengendalian hewan ternak juga menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban ternak merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah daerah yang melibatkan berbagai perangkat daerah terkait (Rita et al, 2024). Selain itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan pengendalian hewan ternak di Kabupaten Morowali menemukan bahwa pengendalian ternak lebih banyak dikaji dari perspektif implementasi kebijakan dibandingkan dengan analisis peran organisasi pelaksana secara langsung (Sanjaya et al., 2023).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan penegakan regulasi. Kajian yang dilakukan oleh dosen IPDN menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki posisi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sinergi kelembagaan, penegakan peraturan daerah, serta pemeliharaan ketertiban masyarakat (Supriyatna, 2020; Alam, 2024; Rahmadanita & Nurrahman, 2024). Di tingkat internasional, studi mengenai tata kelola pemerintahan dan penegakan regulasi lokal juga menegaskan bahwa efektivitas organisasi publik sangat dipengaruhi oleh kejelasan peran kelembagaan, kapasitas organisasi, dan kualitas implementasi kebijakan publik. Penelitian oleh (Biddle, 1986) menekankan bahwa keberhasilan organisasi dalam menjalankan tugasnya ditentukan oleh kesesuaian antara harapan peran, norma peran, perilaku peran, dan evaluasi peran. Selain itu, penelitian oleh (Ostrom, 1990) menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya dan ketertiban publik memerlukan institusi yang mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten. Sementara itu, studi oleh (Meier & O'Toole, 2001) menegaskan bahwa kinerja organisasi publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajerial dan kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Temuan-temuan tersebut memperkuat pentingnya peran Satpol PP sebagai organisasi publik yang bertanggung jawab dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, termasuk dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak di daerah (Singgir, et al, 2025).

Kajian mengenai peran organisasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas aparatur tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menjalankan peran yang melekat pada kedudukannya. Dalam konteks pemerintahan daerah, Satpol PP merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketenteraman serta ketertiban umum (Supriyatna, 2020; Fahmi, 2022; Suhendi, 2019; Alam, 2024; Varian & Tefa, 2025). Sejalan dengan itu, berbagai penelitian internasional menegaskan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, hubungan antaraktor pemerintahan, akuntabilitas organisasi, serta implementasi kebijakan publik yang efektif (Fatimah, 2024; Widodo et al, 2025; Polrendo et al, 2025; Martino, 2024). Kajian *governance* modern juga menunjukkan bahwa organisasi publik dituntut untuk mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengendalian sesuai mandat kelembagaan guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat (Nurman, 2024; Kusuma, 2023). Oleh karena itu, penelitian mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak menjadi penting karena memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan studi pemerintahan daerah, khususnya terkait pelaksanaan peran kelembagaan dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.

Pada bidang penyelenggaraan ketertiban umum, berbagai penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam penegakan Peraturan Daerah dan pemeliharaan ketenteraman masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan Peraturan Daerah sangat berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kelembagaan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketertiban umum (Musa, 2024). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa Satpol PP berperan sebagai pelaksana penegakan regulasi daerah melalui kegiatan pengawasan, operasi lapangan, dan penegakan ketentuan yang berlaku (Ramadani, 2025). Selain itu, kualitas penyelenggaraan ketertiban umum juga dipengaruhi oleh pelaksanaan fungsi Satpol PP sebagai instrumen pemerintah daerah dalam menjaga keteraturan kehidupan masyarakat (Muzakky & Khumayah, 2026).

Di lingkungan akademik IPDN, penelitian mengenai Satpol PP umumnya berfokus pada penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP berperan sebagai pelaksana kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan tugas penegakan regulasi daerah (Alam, 2024). Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih didominasi oleh kajian implementasi kebijakan dan efektivitas penegakan Peraturan Daerah. Penelitian yang secara khusus mengkaji peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak menggunakan teori peran B.J. Biddle masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena secara khusus menganalisis peran Satpol PP dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi melalui dimensi harapan peran, norma peran, perilaku peran, dan evaluasi peran.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki beberapa unsur kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian terdahulu. Dari aspek objek penelitian, penelitian ini secara khusus mengkaji peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah terhadap pedagang kaki lima, bangunan liar, ketertiban umum, penyakit masyarakat, maupun perlindungan masyarakat. Sementara

itu, penelitian yang secara spesifik menempatkan penertiban hewan ternak sebagai fokus utama kajian masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan perspektif yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan peran Satpol PP pada bidang penertiban hewan ternak sebagai bagian dari penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Lokasi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah-daerah yang menjadi lokasi penelitian terdahulu karena masyarakat Kecamatan Sarmi masih memiliki aktivitas peternakan yang cukup dominan dan menjadi bagian dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Kondisi tersebut menjadikan penertiban hewan ternak sebagai isu yang memiliki relevansi tersendiri dalam penyelenggaraan ketertiban umum di daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris baru mengenai pelaksanaan peran Satpol PP dalam konteks wilayah

Kabupaten Sarmi yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Selain itu, kebaruan penelitian ini juga terletak pada penggunaan teori peran *(Role Theory)* yang dikemukakan oleh B.J. Biddle sebagai landasan analisis. Penelitian terdahulu yang membahas penertiban hewan ternak umumnya menggunakan perspektif implementasi kebijakan, efektivitas organisasi, atau penegakan regulasi daerah. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan dimensi harapan peran *(role expectations)*, norma peran *(role norms)*, perilaku peran *(role behavior)*, dan evaluasi peran *(role evaluation)* untuk menganalisis pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penertiban hewan ternak. Dari aspek metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan pengungkapan secara mendalam mengenai pelaksanaan peran Satpol PP berdasarkan pengalaman dan praktik yang terjadi di lapangan. Adapun kebaruan temuan penelitian ini terletak pada deskripsi dan analisis mengenai pelaksanaan peran Satpol PP dalam penertiban hewan ternak melalui empat dimensi teori peran B.J. Biddle, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana peran kelembagaan Satpol PP dijalankan dalam konteks penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Desain penelitian deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan peran Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah serta penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan teori peran B.J. Biddle yang meliputi harapan peran *(role expectations)*, norma peran *(role norms)*, perilaku peran *(role behavior)*, dan evaluasi peran *(role evaluation)*.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Sarmi merupakan wilayah yang memiliki aktivitas peternakan yang cukup dominan serta menjadi salah satu wilayah yang menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Selain itu, masih terdapat aktivitas penertiban hewan ternak yang

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan ketertiban umum di wilayah tersebut sehingga relevan dengan fokus penelitian.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarmi, pejabat dan anggota Satpol PP yang terlibat dalam kegiatan penertiban hewan ternak, aparat kecamatan, aparat kelurahan, serta masyarakat yang mengetahui pelaksanaan penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi. Pemilihan informan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan peran Satpol PP dalam penertiban hewan ternak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan peran Satpol PP dalam penertiban hewan ternak. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas dan kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, laporan kegiatan Satpol PP, data jumlah hewan ternak, serta dokumen lain yang mendukung penelitian.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dikondensasi melalui proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemusatan informasi yang relevan dengan dimensi penelitian. Data yang telah terkondensasi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data. Tahap terakhir dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sehingga diperoleh gambaran mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi.

Uji validitas data dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan penelitian. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan kembali data yang diperoleh kepada informan terkait untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan informasi. Melalui penerapan triangulasi tersebut, data yang digunakan dalam penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi sehingga mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Harapan Peran *(Role Expectations)*

Tabel 1.

Harapan Peran Satpol PP dalam Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Sarmi

No	Harapan Peran	Bentuk Harapan
1	Penegakan Peraturan Daerah	Melaksanakan Perda Kabupaten Sarmi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak

No	Harapan Peran	Bentuk Harapan
2	Penyelenggaraan Ketertiban Umum	Menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran
3	Pengawasan Hewan Ternak	Melakukan pengawasan terhadap hewan ternak yang berada di fasilitas umum
4	Pelaksanaan Tugas Satpol PP	Menjalankan tugas sesuai fungsi Satpol PP sebagai penegak Perda
5	Pelayanan kepada Masyarakat	Memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat

Sumber: Hasil wawancara dan dokumentasi diolah peneliti, 2025.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa harapan terhadap peran Satpol PP dalam penertiban hewan ternak tidak hanya berasal dari ketentuan peraturan daerah, tetapi juga dari masyarakat yang menginginkan terciptanya kondisi lingkungan yang tertib dan aman. Harapan tersebut menjadi dasar pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi.

Harapan peran berkaitan dengan ekspektasi organisasi dan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak. Berdasarkan hasil penelitian, harapan peran Satpol PP di Kecamatan Sarmi telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan fungsi Satpol PP. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP diharapkan mampu menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui penegakan peraturan daerah yang berkaitan dengan pemeliharaan hewan ternak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah menjalankan peran yang diharapkan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan penertiban terhadap hewan ternak yang berkeliaran di ruang publik. Harapan tersebut tidak hanya berasal dari organisasi pemerintah daerah, tetapi juga dari masyarakat yang menginginkan terciptanya lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman. Keberadaan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap penegakan peraturan daerah menjadikan lembaga ini memiliki posisi strategis dalam mewujudkan ketertiban umum di Kecamatan Sarmi.

Menurut teori peran B.J. Biddle, harapan peran merupakan seperangkat ekspektasi yang ditujukan kepada individu atau organisasi berdasarkan kedudukan yang dimilikinya (Biddle, 1986). Dalam konteks penelitian ini, harapan peran Satpol PP tercermin melalui pelaksanaan tugas yang sesuai dengan mandat kelembagaan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki peran utama dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum sebagai bagian dari fungsi pemerintahan daerah (Musa, 2024; Alam, 2024).

3.2 Norma Peran *(Role Norms)*

Tabel 2.

Norma Peran Satpol PP dalam Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Sarmi

No	Norma Peran	Dasar Pelaksanaan
1	Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 10 Tahun 2017	Mengatur kewajiban dan larangan pemilik ternak
2	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018	Mengatur tugas dan fungsi Satpol PP
3	SOP Penertiban	Menjadi pedoman operasional penertiban

No	Norma Peran	Dasar Pelaksanaan
4	Kode Etik Aparatur	Menjadi pedoman perilaku petugas
5	Ketentuan Administratif	Menjadi dasar pelaksanaan tindakan penertiban

Sumber: Dokumentasi Satpol PP Kabupaten Sarmi, 2025.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban hewan ternak dilakukan berdasarkan norma dan ketentuan yang berlaku. Norma tersebut menjadi pedoman bagi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya sehingga pelaksanaan penertiban memiliki dasar hukum yang jelas. Norma peran merupakan aturan, ketentuan, dan pedoman yang menjadi dasar bagi organisasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 10 Tahun 2017 serta berbagai regulasi yang mengatur tugas dan fungsi Satpol PP sebagai perangkat daerah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa norma peran menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas penertiban hewan ternak. Satpol PP menjalankan tugasnya dengan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan penertiban dilakukan dalam kerangka penegakan hukum daerah. Norma tersebut menjadi dasar yang mengatur hubungan antara organisasi dengan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

Dalam perspektif teori peran, norma peran berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku organisasi agar sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan (Biddle, 1986). Keberadaan norma peran memungkinkan setiap tindakan yang dilakukan organisasi memiliki landasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP senantiasa didasarkan pada ketentuan hukum dan regulasi daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan ketertiban umum (Ramadani, 2025; Kusuma, 2023).

3.3 Perilaku Peran (*Role Behavior*)

Tabel 3.
Perilaku Peran Satpol PP dalam Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Sarmi

No	Bentuk Perilaku Peran	Pelaksanaan
1	Sosialisasi	Penyampaian informasi mengenai aturan pemeliharaan ternak
2	Patroli	Pemantauan wilayah yang sering ditemukan ternak berkeliaran
3	Penertiban	Pengamanan hewan ternak yang berada di fasilitas umum
4	Pendataan	Pencatatan hewan ternak yang diamankan
5	Penerapan Ketentuan	Pelaksanaan tindakan sesuai peraturan yang berlaku

Sumber: Hasil wawancara dan observasi, 2025.

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa perilaku peran Satpol PP diwujudkan melalui berbagai aktivitas operasional yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan penertiban hewan ternak. Aktivitas tersebut menunjukkan implementasi nyata dari tugas dan fungsi Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah. Perilaku peran merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh organisasi dalam menjalankan perannya. Berdasarkan hasil penelitian, perilaku peran Satpol PP dalam penertiban hewan ternak diwujudkan melalui pelaksanaan

kegiatan sosialisasi, patroli, penertiban, serta penerapan ketentuan yang berlaku terhadap hewan ternak yang ditemukan berkeliaran di wilayah Kecamatan Sarmi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perilaku peran Satpol PP tercermin dalam aktivitas operasional yang dilakukan secara langsung di lapangan. Pelaksanaan patroli dan penertiban menunjukkan adanya tindakan nyata yang dilakukan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Aktivitas tersebut merupakan bentuk implementasi peran Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum.

Menurut Biddle, perilaku peran merupakan bentuk aktualisasi dari harapan dan norma yang melekat pada suatu kedudukan atau organisasi (Biddle, 1986). Dalam penelitian ini, perilaku peran Satpol PP menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya memiliki kewenangan formal, tetapi juga melaksanakan tindakan yang sesuai dengan peran yang diemban. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi Satpol PP diwujudkan melalui aktivitas operasional yang berorientasi pada penegakan peraturan daerah dan pemeliharaan ketertiban umum (Effendy, 2020; Singarimbun, 2025).

Tabel 4.
Data Hewan Ternak yang Diamankan Satpol PP Kecamatan Sarmi Tahun 2023–2024

Tahun	Babi (Ekor)	Sapi (Ekor)	Kerbau (Ekor)
2023	3	2	-
2024	7	4	2
Total	10	6	2

Sumber: Satpol PP Kabupaten Sarmi, 2024.

Data tersebut menunjukkan pelaksanaan kegiatan penertiban yang dilakukan Satpol PP terhadap hewan ternak yang berkeliaran di wilayah Kecamatan Sarmi. Data ini memperkuat temuan mengenai perilaku peran Satpol PP dalam menjalankan fungsi penertiban hewan ternak.

3.4 Evaluasi Peran *(Role Evaluation)*

Tabel 5.
Evaluasi Peran Satpol PP dalam Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Sarmi

No	Aspek Evaluasi	Bentuk Evaluasi
1	Pelaksanaan Tugas	Penilaian kesesuaian pelaksanaan penertiban dengan tugas pokok dan fungsi
2	Kepatuhan terhadap Regulasi	Penilaian kesesuaian tindakan dengan peraturan yang berlaku
3	Pelaksanaan Program	Evaluasi kegiatan penertiban yang telah dilaksanakan
4	Dokumentasi Kegiatan	Penyusunan laporan kegiatan penertiban
5	Akuntabilitas Organisasi	Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada pimpinan

Sumber: Hasil wawancara dan dokumentasi, 2025.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa evaluasi peran dilakukan melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas penertiban yang telah dilakukan. Evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan peran Satpol PP berjalan sesuai dengan harapan dan norma yang telah ditetapkan. Evaluasi peran berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berdasarkan harapan dan norma yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi terhadap pelaksanaan penertiban hewan ternak dilakukan melalui penilaian terhadap

pelaksanaan kegiatan penertiban sebagai bagian dari tugas kelembagaan Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum di Kecamatan Sarmi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa evaluasi peran dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penertiban hewan ternak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam menilai kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan tujuan penyelenggaraan ketertiban umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya evaluasi, pelaksanaan peran Satpol PP dapat diketahui tingkat kesesuaiannya dengan mandat kelembagaan yang dimiliki.

Dalam teori peran B.J. Biddle, evaluasi peran merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan peran berdasarkan harapan dan norma yang telah ditentukan sebelumnya (Biddle, 1986). Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi peran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penertiban hewan ternak. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan mekanisme penting dalam memastikan pelaksanaan tugas organisasi publik berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Fatimah, 2024; Nurman, 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi telah dilaksanakan melalui dimensi harapan peran, norma peran, perilaku peran, dan evaluasi peran. Keempat dimensi tersebut saling berkaitan dalam menggambarkan pelaksanaan peran Satpol PP sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi dilaksanakan melalui empat dimensi teori peran B.J. Biddle, yaitu harapan peran, norma peran, perilaku peran, dan evaluasi peran. Pada dimensi harapan peran, Satpol PP melaksanakan tugas sesuai dengan ekspektasi yang melekat pada kedudukannya sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum. Pada dimensi norma peran, pelaksanaan tugas penertiban hewan ternak dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi daerah yang berlaku. Sementara itu, dimensi perilaku peran tercermin melalui pelaksanaan kegiatan penertiban yang dilakukan secara langsung di lapangan, sedangkan dimensi evaluasi peran menunjukkan adanya penilaian terhadap pelaksanaan tugas sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan Satpol PP.

Temuan tersebut memperkuat pandangan teori peran yang dikemukakan oleh B.J. Biddle bahwa suatu organisasi menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya berdasarkan seperangkat harapan, norma, perilaku, dan evaluasi yang melekat pada kedudukannya (Biddle, 1986). Dalam konteks penelitian ini, peran Satpol PP tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan tugas formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai proses kelembagaan yang diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, teori peran mampu menjelaskan bagaimana Satpol PP menjalankan fungsi kelembagaannya dalam penertiban hewan ternak melalui hubungan yang saling berkaitan antara harapan organisasi, norma yang berlaku, perilaku pelaksana, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas (Sanjaya et al, 2025).

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam

penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketenteraman serta ketertiban umum (Musa, 2024; Alam, 2024). Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Satpol PP diwujudkan melalui aktivitas operasional yang mengacu pada ketentuan hukum dan regulasi daerah yang berlaku (Ramadani, 2025; Effendy, 2020). Namun demikian, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik dibandingkan penelitian sebelumnya karena menempatkan penertiban hewan ternak sebagai objek utama kajian serta menganalisisnya menggunakan perspektif teori peran B.J. Biddle.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan kajian pemerintahan daerah, khususnya mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak. Penelitian ini memperluas penerapan teori peran dalam studi pemerintahan dengan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP dapat dianalisis melalui dimensi harapan peran, norma peran, perilaku peran, dan evaluasi peran. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris berupa gambaran mengenai pelaksanaan peran Satpol PP dalam konteks penertiban hewan ternak yang masih relatif terbatas dibahas dalam penelitian terdahulu.

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini menegaskan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi merupakan manifestasi dari pelaksanaan fungsi kelembagaan yang dijalankan berdasarkan harapan peran, norma peran, perilaku peran, dan evaluasi peran. Keempat dimensi tersebut membentuk satu kesatuan yang menjelaskan bagaimana Satpol PP menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi telah dilaksanakan melalui dimensi harapan peran, norma peran, perilaku peran, dan evaluasi peran. Pada dimensi harapan peran, Satpol PP menjalankan tugas sesuai dengan ekspektasi kelembagaan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum. Pada dimensi norma peran, pelaksanaan penertiban hewan ternak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi daerah yang berlaku. Selanjutnya, pada dimensi perilaku peran, Satpol PP melaksanakan kegiatan penertiban hewan ternak sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Adapun pada dimensi evaluasi peran, pelaksanaan penertiban dilakukan melalui penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tugas dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi telah diwujudkan melalui pelaksanaan harapan peran, norma peran, perilaku peran, dan evaluasi peran yang saling berkaitan dalam mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Keterbatan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian. Pertama, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan proses pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu yang relatif terbatas sehingga pengamatan terhadap pelaksanaan penertiban hewan ternak hanya menggambarkan kondisi pada saat penelitian berlangsung. Kedua, penelitian ini hanya dilaksanakan di Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong

Praja dalam penertiban hewan ternak pada wilayah lain yang memiliki karakteristik berbeda. Ketiga, data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar bersumber dari dokumen yang tersedia pada instansi terkait serta hasil wawancara dan observasi selama penelitian berlangsung, sehingga informasi yang diperoleh terbatas pada data yang dapat diakses oleh peneliti. Keempat, jumlah informan penelitian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan ketersediaan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan penertiban hewan ternak, sehingga perspektif yang diperoleh masih terbatas pada informan yang terlibat dalam penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak dengan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga memungkinkan dilakukannya perbandingan antar kecamatan, kabupaten, maupun daerah yang memiliki karakteristik sosial dan geografis yang berbeda. Selain itu, penelitian mendatang dapat dilakukan dalam rentang waktu yang lebih panjang untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan peran Satpol PP dalam penertiban hewan ternak secara berkelanjutan. Pengembangan lokasi dan periode penelitian tersebut diharapkan mampu menghasilkan temuan yang lebih representatif mengenai pelaksanaan fungsi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

Penelitian berikutnya juga dapat memperluas sumber data dan jumlah informan sehingga mampu memberikan perspektif yang lebih beragam mengenai pelaksanaan penertiban hewan ternak. Di samping itu, penggunaan pendekatan penelitian yang berbeda, seperti metode kuantitatif atau mixed methods, dapat dipertimbangkan untuk memperkaya analisis dan memperkuat temuan empiris mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan kajian pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan peran perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketenteraman serta ketertiban umum.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pemerintah Kabupaten Sarmi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarmi, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan informasi selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan penyelenggaraan ketenteraman serta ketertiban umum di daerah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alam, M. D. (2024). Enforcement of regional regulation No. 2 of 2018 on public order and community tranquility by Satpol PP in Tulang Bawang Regency, Lampung Province. *Jurnal Tatapamong, 6*(1), 49–64. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v6i1.4174

Anggraini, T. P. (2022). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban umum. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*. https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/658

Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. *Annual Review of Sociology, 12*, 67–92. https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435

Effendy, M. I. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Berau. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id

Eviany, E. (2025). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Tatapamong, 1*(1), 1–66. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/20040

Fahmi, F. A. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum. *Jurnal Tatapamong, 4*(1). https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/2445

Fatimah, M. (2024). Central-local government relations in regional planning and budgeting policies. *Policy & Governance Review*. https://journal.iapa.or.id/pgr/article/view/922

Hidayatulloh, B. A. (2025). The role of regional regulations in optimizing public order and community protection. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/3542

Kusuma, N. E. (2023). Enforcement of regional regulations as the implementation of Satpol PP duties. *Airlangga Development Journal*. https://e-journal.unair.ac.id/ADJ/article/view/72316

Martino, M. (2024). Policy content analysis of population administration policies during crisis. *Jurnal Borneo Administrator, 20*(3). https://jba.lan.go.id/article/view/1463

Meier, K. J., & O'Toole, L. J., Jr. (2001). Managerial strategies and behavior in networks: A model with evidence from U.S. public education. *Journal of Public Administration Research and Theory, 11*(3), 271–293. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a003503

Musa, H. (2024). The effectiveness of the function of the Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) in enforcing regional regulations on public order. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. https://journals.ubmg.ac.id/index.php/JIAP/article/view/2656

Muzakky, H., & Khumayah, S. (2026). The performance quality of local police officers in enforcing regional regulations. *Athena Journal*. https://journal.mediadigitalpublikasi.com/index.php/athena/article/view/651

Nurman, N. (2024). The dynamics of theoretical approaches in contemporary governance. *Jurnal Kebijakan Publik*. https://journal.uir.ac.id/index.php/JKP/article/view/21508

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763

Polrendo, P., Pramudiana, I. D., & Haryati, E. (2025). How "good" governance in Indonesia? A systematic literature review. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2*(5). https://ejournal.appisi.or.id/index.php/hukum/article/view/582

Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2024). Analysis of the enforcement of regional regulations on public order, peace, and community protection in Bandung City. *Jurnal Tatapamong, 6*(2), 172–187. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v6i2.5041

Ramadani, T. (2025). Law enforcement by the Satpol PP against violations of regional regulations. *Journal of Law, Politic and Humanities*. https://dinastires.org/JLPH/article/view/2411

Rita, R., Ambo, N., & Raza, H. A. (2024). Implementation of the policy for supervision and control of livestock in Pasangkayu District. *Law Pass Journal*. https://lawpass.org/index.php/ojs/article/view/4

Sanjaya, R., Mangngasing, N., & Nuraisyah. (2023). Implementation of farm animal control policy in Bungku Tengah District, Morowali Regency. *Sinomics Journal*. https://sinomicsjournal.com/index.php/sj/article/view/253

Singarimbun, D. P. (2025). The role of the Pamong Praja Police Unit in the control of street vendors. *JPPUMA*. https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/14165

Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. *Jurnal Tatapamong*. https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1145

Sukmawati, S. (2024). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*. https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/675

Supriyatna, D. (2020). Sinergisitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Konstituen*. https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2341

Varian, J. A., & Tefa, G. (2025). Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan ketertiban umum. *Jurnal Tatapamong*. https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/5512

Widodo, W., Prastyawan, A., & Daulay, P. (2025). Analysis of implementation of the livestock control policy. *International Journal of Business and Management Research,* *5*(2). https://doi.org/10.54099/ijibmr.v5i2.1611